



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**BALAI PELESTARIAN NILAI
BUDAYA MAKASSAR**

Wilayah Kerja Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara
dan Sulawesi Barat

Jalan Sultan Alauddin Km.07 Makassar 90221

Telepon (021) 883748, 885119 Fax. 865166

Laman : Info@BPSNT – Makassar. net www BPSNT Makassar

RENSTRA BPNB
MAKASSAR

2015 – 2019

Isi Renstra:

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 BPNB Makassar

Bab 3 Analisis Lingkungan dan
Faktor Penentu
Keberhasilan

Bab 4 Program BPNB
Makassar

Bab 5 Penutup

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BALAI PELESTARIAN
NILAI BUDAYA (BPNB)
MAKASSAR**

2015 - 2019

Makassar, Januari 2014

KATA PENGANTAR

Renstra ini disusun dengan tujuan memberikan kemudahan bagi lembaga terkait dan masyarakat untuk memahami kinerja yang dilakukan oleh **Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Makassar**. Selain itu, dalam Renstra ini juga terdapat informasi tentang tujuan dan sasaran kegiatan yang akan kami laksanakan dalam 5 tahun ke depan serta indikator yang kami gunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan program.

Harapan kami, semoga Renstra ini dapat dijadikan untuk referensi bagi pihak-pihak terkait dan sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan program kerja lima tahunan (2015-2019) yang akan dilaksanakan oleh **BPNB Makassar**.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak, khususnya para tenaga teknis dan semua pihak yang telah membantu sehingga Renstra ini diterbitkan dan sampai ke tangan pembaca dan ada manfaatnya.

Makassar, 15 Januari 2014
Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan
Nilai Tradisional Makassar,

Dra. Lindyastuti Setiawati
NIP.19580226 198703 2 001



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah dan budaya merupakan dua kata yang saling bertautan. Kedua kata tersebut mengarah kepada pemahaman tentang jati diri suatu bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengakui dan bangga terhadap sejarah dan budayanya. Sejarah adalah aktivitas manusia dalam hidupnya yang membawa perubahan pada masa lampau. Sejarah tidak hanya menyangkut sesuatu yang lampau saja, tetapi juga sesuatu yang aktual, hidup, dan sebenarnya juga mempunyai suatu ikatan antara masyarakat tersebut dengan masa lampau. Oleh karena itu, apabila suatu bangsa melupakan sejarahnya, maka dapat dikatakan bangsa tersebut akan terlepas dari akar kehidupan yang memberikan identitas bangsa, yaitu warisan masa lampau. Pada bagian lain, apabila kita berbicara kebudayaan dan peradaban, para orang bijak pernah mengatakan bahwa salah satu “buku petunjuk” yang dapat mengarahkan manusia menjalani kehidupan. Sejak kita lahir ke dunia, kedua orang tua kita mengajarkan budaya kepada kita. Semakin kita dewasa, semakin banyak nilai-nilai budaya yang kita terima. Di masyarakat kita tinggal, kita menerima berbagai macam adat-istiadat yang berlaku. Dengan demikian, budaya sebenarnya merupakan sentral dari aturan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.

Gambaran di atas menunjukkan peran yang sangat berat dan mendasar yang diemban oleh BPNB Makassar dalam bidang sejarah dan budaya. Pembangunan sejarah dan kebudayaan akan memberikan kontribusi yang penting dalam memperkuat ketahanan budaya, persatuan dan kesatuan bangsa, serta dalam membangun jati diri masyarakat di Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara yang berwawasan kebangsaan. Pembangunan pariwisata yang berkarakter masyarakat di Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara diharapkan akan mampu mensukseskan program yang telah disusun oleh pemerintah daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai modal dasar dalam membangun perekonomian daerah dan nasional, membangun warisan budaya daerah dan meningkatkan ketahanan daerah dan nasional.

B. Pengertian

Rencana Strategis atau disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Makassar yang memuat visi, misi dan arah program kerja BPNB Makassar mulai dari tahun 2015 sampai 2019.

C. Maksud dan Tujuan

Naskah Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Makassar ini disusun dengan **maksud** yakni :

1. Untuk memberikan landasan dan arah bagi penyelenggara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan berdiri Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Makassar dan visi serta misi Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Makassar

2. Untuk dipahami oleh berbagai pihak terkait, baik langsung maupun tidak langsung, tentang gambaran tentang keberadaan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Makassar agar diperoleh kesamaan pemahaman yang kemudian dapat mencapai keserasian kebijaksanaan dan langkah yang mendukung pencapaian sasaran

Tujuan dari Rencana Strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Makassar, yakni :

1. Menetapkan visi, misi dan arah kerja dari Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Makassar
2. Supaya dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan strategi, dan program kebudayaan dan kepariwisataan dari berbagai pihak (*stakeholder*) serta sektor pendukung lainnya.
3. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang baik dengan lembaga lain di pusat dan di daerah baik pemerintah kota/kabupaten di daerah wilayah kerja.
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

D. Landasan Penyusunan

D.1 Landasan Pembangunan Kebudayaan dan Kesejarahan

Kebudayaan sebagai perwujudan kemampuan manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya menjadi acuan (pedoman) bagi masyarakat dalam melakukan tata pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai sebuah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya, maka seluruh kebudayaan suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia adalah kebudayaan nasional Indonesia. Hal ini berarti bahwa disamping berlaku sistem nilai budaya, suku bangsa atau budaya lokal dalam menata kehidupannya, juga berlaku sistem nilai budaya nasional yang berisi nilai-nilai dasar yang disepakati secara nasional.

Bagi bangsa Indonesia, nilai dasar yang disepakati sebagai acuan nasional dalam menata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dituangkan dalam lima dasar negara, yang biasa disebut Pancasila. Sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila menjadi landasan berfikir secara holistik dalam mengimplementasikan berbagai kehendak baik untuk kehendak mengembangkan (*dinamis*) maupun mempertahankan nilai-nilai dasar itu (*preservatif*).

Disamping itu pernyataan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : *"melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia"*. Pada hakekatnya mencerminkan nilai-nilai filosofis yang bersumber pada nilai dasar kebudayaan bangsa. UUD 1945 menjadi landasan hukum konstitusional dalam mengantisipasi berbagai permasalahan kehidupan masyarakat, termasuk permasalahan di bidang kebudayaan. Kebudayaan adalah tali pengikat atau semen yang menyatu-padukan seluruh suku bangsa menjadi satu bangsa.

Disamping itu nilai tradisional merupakan satu diantara unsur kebudayaan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia. Kesejarahan adalah nilai-nilai yang terkandung dalam pemikiran tokoh dan peristiwa serta dalam benda bergerak dan yang tidak bergerak yang terjadi di masa lalu yang direkonstruksi untuk kepentingan masa kini dan di masa depan. Nilai-nilai tradisional yang sebenarnya

juga nilai-nilai masa lalu yang direproduksi dan ditransformasi untuk kepentingan masa kini dan masa depan.

Perkembangan kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari proses reproduksi dan transformasi nilai-nilai masa lalu, masa kini, dan masa depan yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman.

D.2 Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 53 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya



BAB 2

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA MAKASSAR

A. Latar Belakang

Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Makassar yang berkedudukan di kota Makassar adalah balai yang tergolong paling awal didirikan dari 11 balai yang ada di tanah air kita. Awalnya UPT ini pertama kali bernama Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada masa pemerintahan Presiden Abd. Rahman Wahid, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipecah menjadi dua. Departemen Pendidikan berdiri sendiri dengan nama Departemen Pendidikan Nasional, sedangkan unsur kebudayaannya bergabung dengan Pariwisata yang kemudian membentuk Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sampai sekarang.

Dasar pikiran untuk pembentukan Balai ini pada mulanya adalah untuk membentuk satu lembaga yang dapat melakukan penelitian guna mendapatkan data tentang sejarah dan budaya pada suatu daerah. Oleh karena pembentukan itu memerlukan dana yang tidak sedikit dan personil yang banyak, maka diputuskan pembentukan itu berdasarkan pada kesamaan daerah, kedekatan geografis, serta kesamaan kebudayaan, bukan berdasarkan daerah administrasi, tentu saja dengan penekanan pada tema-tema tertentu. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya Balai menangani lebih dari satu Propinsi, bahkan ada Balai yang memiliki ruang gerak pada satu pulau, misalnya BPNB Pontianak yang menangani Pulau Kalimantan.

BPNB Makassar dan Yogyakarta didirikan pada tahun 1981 berdasarkan SK Mendikbud No. 0140/0/1981. Pada awal berdirinya BPNB merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah Direktur Jenderal Kebudayaan. Fungsi Balai pada waktu itu adalah melakukan pengamatan dan analisa kesejarahan dan nilai tradisional daerah yang tercermin dalam sistem sosial, sistem kepercayaan, lingkungan budaya dan tradisi lisan. Selain itu pula, balai melakukan dokumentasi dan memberikan informasi kesejarahan dan nilai tradisional daerah serta melakukan tata usaha dan urusan rumah tangga Balai.

Pada awalnya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata lebih menitikberatkan fungsi dan tugasnya pada kebijakan-kebijakan, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. Sejak tanggal 26 Juni 2003, Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata digabungkan ke dalam Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Pada tahun 2003, lewat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor KM.52/OT.001/MKP/2003, BPNB merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan yang sehari-hari dilaksanakan oleh Asisten Deputi Urusan Tradisi. Pada bulan Agustus 2005, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berubah nama menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, dan pada awal tahun 2010 kembali berubah menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata kembali. Dalam urusan administrasi Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional yang

berubah nama menjadi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar pada tahun 2009 awal berada langsung di bawah Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film.

Pada tahun 2012, setelah Kementerian Pendidikan bergabung kembali dengan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kembali Balai berubah nama menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Makassar berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 53 tahun 2012 tentang organisasi dan tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya.

B. Pernyataan Visi dan Misi

Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, adalah salah satu UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai satu Balai yang bergerak dalam bidang penelitian, memiliki visi sebagai sesuatu yang dicita-citakan. Visi dari BPNB Makassar adalah:

**“TERWUJUDNYA NILAI – NILAI SEJARAH DAN BUDAYA
YANG LESTARI SERTA BERKEMBANG MENUJU MASYARAKAT YANG
BERADAB”**

sedangkan untuk mencapai visi itu, BPNB Makassar mempunyai misi untuk melakukan seoptimal mungkin penelitian, pengkajian, perekaman, penerbitan, seminar, penyuluhan, pendokumentasian, dan penyebarluasan (publikasi) mengenai kesejarahan, nilai tradisional, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui misi itu BPNB Makassar berharap akan dapat melakukan beberapa hal, antara lain:

- 1] meningkatkan ketahanan budaya masyarakat, dan
- 2] meningkatkan pemahaman *stakeholder* akan pentingnya pelestarian, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai sejarah, budaya, seni dan film.

C. Tugas dan Fungsi

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Makassar dibebankan:

Tugas:

melaksanakan pelestarian kebudayaan yang mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pendokumentasian aspek-aspek nilai budaya, seni, dan film serta kesejarahan

fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan rencana dan program
- Pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek nilai budaya, seni dan film serta kesejarahan
- Pengembangan hasil kajian

- Pelaksanaan pengemasan hasil kajian dan pemanfaatannya
- Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan
- Pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi
- Pelaksanaan perlindungan
- Pelaksanaan pelayanan publik
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai pelestarian

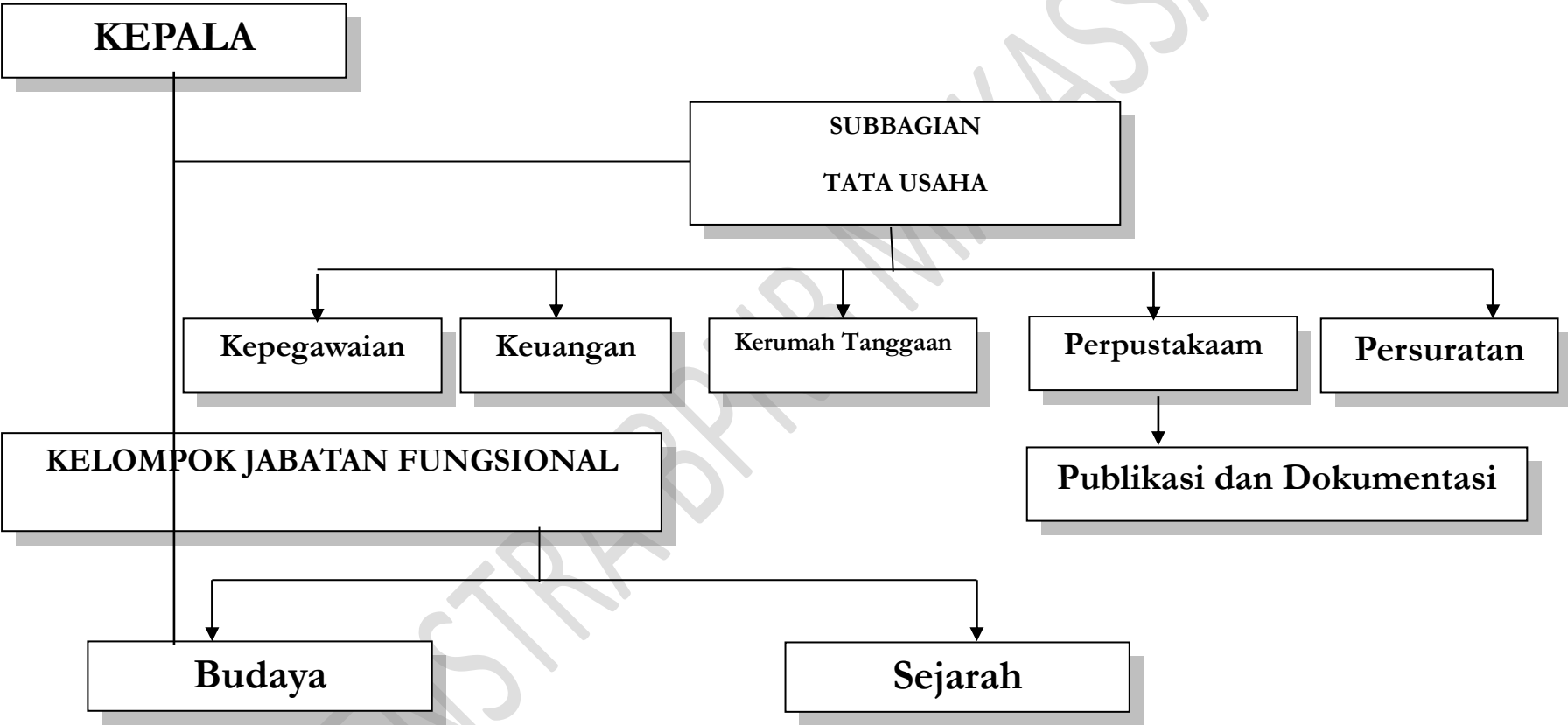
Dengan Tupoksi ini, BPNB Makassar memainkan peran sangat berat dan penting dalam pembangunan jati-diri bangsa di tengah krisis karakter dan integrasi bangsa, memajukan ilmu pengetahuan, serta hasilnya bermuara pada pemanfaatan praktis di bidang pendidikan oleh masyarakat. Selain tugas pokok dan fungsi tersebut juga melaksanakan tugas penunjang lainnya seperti pembinaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan ketatausahaan.

D. Aktivitas Rutin

Bentuk-bentuk aktifitas kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. Riset, seminar dan diskusi
- b. Penulisan sejarah dan budaya
- c. Pendokumentasian sejarah dan Nilai Tradisional
- d. Pelayanan masyarakat

E. Struktur Organisasi





BAB 3

Analisis Lingkungan dan Faktor Penentu Keberhasilan

A. Pengantar

Analisis Lingkungan adalah analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan baik eksternal maupun internal serta dampaknya terhadap masa depan BPSNT, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap lingkungan internal BPSNT Makassar pada akhirnya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan.

1. Lingkungan Internal

A. Kekuatan

- Visi dan Misi
- Kewenangan untuk melaksanakan penelitian dan pengkajian kesejarahan, budaya, seni dan Film di Provinsi Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara
- Kewenangan untuk berkoordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder di Provinsi Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara
- Komitmen untuk menjalankan tugas dan kebijakan pimpinan.
- SDM yang tersedia telah berkerja secara optimal
- Potensi sejarah dan keragaman budaya masyarakat di wilayah kerja

B. Kelemahan

- Sarana dan prasana yang belum memadai
- Anggaran yang terbatas
- Wilayah kerja yang luas dan ada yang masih sulit dijangkau

2. Lingkungan Eksternal

A. Peluang

- Tuntutan pelayanan publik
- Pengembangan informasi berbasis teknologi
- Menjalin kerjasama dengan stakeholder
- Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan

B. Ancaman

- Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi
- Kebijakan yang sering berubah

- c. Rendahnya mutu pelayanan terhadap publik
- d. Kurangnya pengetahuan Stakeholder terhadap instansi dan kinerja BPSNT

RENSTRA BPNB MAKASSAR



BAB 4

PROGRAM BPNB MAKASSAR

A. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

1. Terwujudnya kajian kebudayaan dan kesejarahan yang berkualitas
2. Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kesejarahan dan kebudayaan.
3. Terwujudnya pendokumentasian dan publikasi kesejarahan dan kebudayaan daerah
4. Terwujudnya pemanfaatan, pengembangan kesejarahan dan kebudayaan daerah
5. Terwujudnya SDM di BPNB Makassar berkualitas, kompetitif, dan kreatif serta inovatif.
6. Terwujudnya kerjasama antara instansi, Pemda, LSM, dll.
7. Terwujudnya fasilitas Sarana dan Prasarana perkantoran yang baik dan berkualitas untuk menunjang peningkatan kinerja

Penentuan satu tujuan harus relevan dengan visi dan misi. Sesuai dengan hal tersebut, maka BPNB Makassar memiliki 3 (tiga) tujuan utama yang ingin dicapai dalam mewujudkan visinya sebagai pusat bank data yang terpercaya. **Pertama** Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian, **kedua** peningkatan mutu sumber daya, dan **ketiga** melestarikan nilai-nilai budaya. Ketiga tujuan utama ini diharapkan dapat mewujudkan keinginan BPNB Makassar untuk menjadi bank data terpercaya dan terkemuka dalam bidang kesejarahan dan kebudayaan. Diharapkan dengan peningkatan mutu penelitian secara tidak langsung akan menjadikan para peneliti menjadi profesional dibidangnya, dan pada gilirannya akan meningkatkan kinerja mereka untuk menghasilkan penelitian yang lebih banyak lagi.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah suatu pernyataan hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu 1 – 12 bulan. Dalam pengertian yang lebih luas, sasaran itu sama dengan tujuan jangka pendek. Dalam upaya untuk mencapai tujuan yang diletakkan pada level puncak harus dapat dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran sehingga dengan mudah dapat dimengerti dan dilaksanakan. Pentingnya penetapan sasaran yang dirumuskan dalam kalimat yang tepat akan memudahkan untuk membuat pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan alokasi penempatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Dalam menentukan sasaran suatu organisasi, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Kriteria itu antara lain:

1. merupakan hasil yang dicapai;
2. menantang tetapi logis, yaitu bisa diprediksi bahwa hal itu bisa dicapai dengan melihat kemampuan yang dimiliki;
3. memberikan kontribusi yang tinggi terhadap tujuan;
4. terkait dengan misi dan visi;
5. sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.

Secara keseluruhan, sasaran yang disusun itu harus memperhatikan spesifikasi, *measurable, attable* atau *achieveable, relevant* dan *time related*. Keseluruhan ini biasa disingkat dengan istilah SMART.

Lain halnya dengan apa yang disarankan oleh Dr. Achmad S. Ruky yang mengklasifikasikan sasaran dalam empat kategori. Kategori itu adalah sasaran dasar, sasaran pemecahan masalah, sasaran inovatif, dan sasaran pengembangan pribadi.

Merujuk pada hal-hal di atas, BPNB Makassar memiliki beberapa sasaran utama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. meningkatnya kualitas hasil penelitian sejarah dan budaya;
2. Meningkatnya jumlah hasil penelitian sejarah dan budaya;
3. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian
4. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap hasil penelitian
5. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional

E. Arah Kebijakan dan Program

Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar telah menetapkan arah kebijakan program pembangunan sejarah dan budaya sebagai berikut

1. Peningkatan peran kebudayaan sebagai wahana persatuan bangsa dan pembinaan ketahanan sejarah dan budaya masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara
2. Peningkatan Pelestarian dan penelitian sejarah serta budaya dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sejarah dan budaya serta penanaman nilai-nilai sejarah, budaya, seni dan film.
3. Peningkatan kesadaran sejarah pada masyarakat dalam rangka pemulihan makna berbangsa dan bernegara bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara

4. Pengembangan *data base* dan jaringan sistem informasi budaya di Provinsi Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara
5. Peningkatan kerjasama dan koordinasi perencanaan budaya lintas sektor melalui kerjasama antarlembaga, antarwilayah, antarpelaku budaya.
6. Menggali kearifan lokal untuk diaplikasikan dalam pembangunan nasional dan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara

Berdasarkan masalah dan arah kebijakan yang dipaparkan pada bagian tersebut di atas, Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar akan melaksanakan **program pelestarian budaya** yang diposisikan dalam kerangka menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dan memperkuat ketahanan sejarah dan budaya masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Selain itu, program pelestarian budaya diarahkan kepada pemanfaatan secara optimal sejarah dan budaya.

Mengacu kepada visi misi, tujuan dan sasaran; serta arah kebijakan strategis pembangunan sejarah dan budaya yang telah ditetapkan, maka Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar menetapkan 1 program pokok pengembangan sejarah dan budaya di Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Selatan dengan penjabaran masing-masing pokok kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelestarian Budaya

- a. Naskah hasil kajian pelestarian nilai budaya
- b. Dokumen pelestarian nilai budaya
- c. Karya Budaya yang diinventarisasi
- d. Peserta Internalisasi Nilai Budaya
- e. Layanan Perkantoran

Program Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar diarahkan pada kebijakan

1. Meningkatkan peran sejarah, budaya, seni dan film sebagai pendorong persatuan dan kesatuan.
2. Mengembangkan benang merah pengikat bangsa dalam segala wujud budaya.
3. Meningkatkan adab dan nilai religius masyarakat di Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara yang berkualitas dan berakhlak.
4. Mengembangkan citra Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan bernuansa kedaerahan.

Program yang akan dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar merupakan kelanjutan dan pengembangan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, program

yang dilaksanakan oleh BPNB Makassar juga merupakan penjabaran dari program yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program yang dibuat merupakan upaya-upaya dalam mengatasi berbagai masalah sejarah, budaya, seni dan film yang ada dan berkembang di Provinsi Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara serta perkembangan lingkungan strategis yang terjadi, baik dalam tataran regional maupun nasional.

RENSTRA BPNB MAKASSAR



BAB 4

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar tahun 2015-2019 ini disusun berdasarkan isu-isu strategis dengan memperhatikan perkembangan lingkungan yang terjadi dan diperhitungkan dalam perkembangan sejarah, budaya, seni dan film di Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara.

Dokumen Rencana Strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kinerja tahunan (RKT). Rencana Strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar.

Dokumen Rencana Strategis tahun 2015 - 2019 ini telah memuat kebijakan dan program yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan perubahan paradigma yang terjadi. Dengan demikian, diharapkan berbagai kebijakan dapat dihasilkan baik dalam penataan kelembagaan, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai aparatur negara, peningkatan pelayanan publik maupun pembangunan ketahanan sejarah dan budaya.

Untuk mewujudkan berbagai perubahan sesuai paradigma tersebut diperlukan proses, waktu, dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dengan adanya perencanaan yang lebih terarah dan didukung iklim yang kondusif, maka pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan dapat dilakukan secara sistemik, bertahap dan berkesinambungan guna mewujudkan *good governance*.

Makassar, 15 Januari 2014
Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan
Nilai Tradisional Makassar,

Dra. Lindyastuti Setiawati
NIP.19580226 198703 2 001